

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi pada banyak negara di dunia dan menjadi masalah sosial yang bersifat global. Hampir semua negara berkembang memiliki masalah kemiskinan. Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, di dalamnya antara lain mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial (Mawardi dan Sudarno, 2003). Kemiskinan juga bisa muncul karena minimnya kepemilikan lahan, maupun terbatasnya akses informasi untuk memberdayakan bagi kaum miskin.

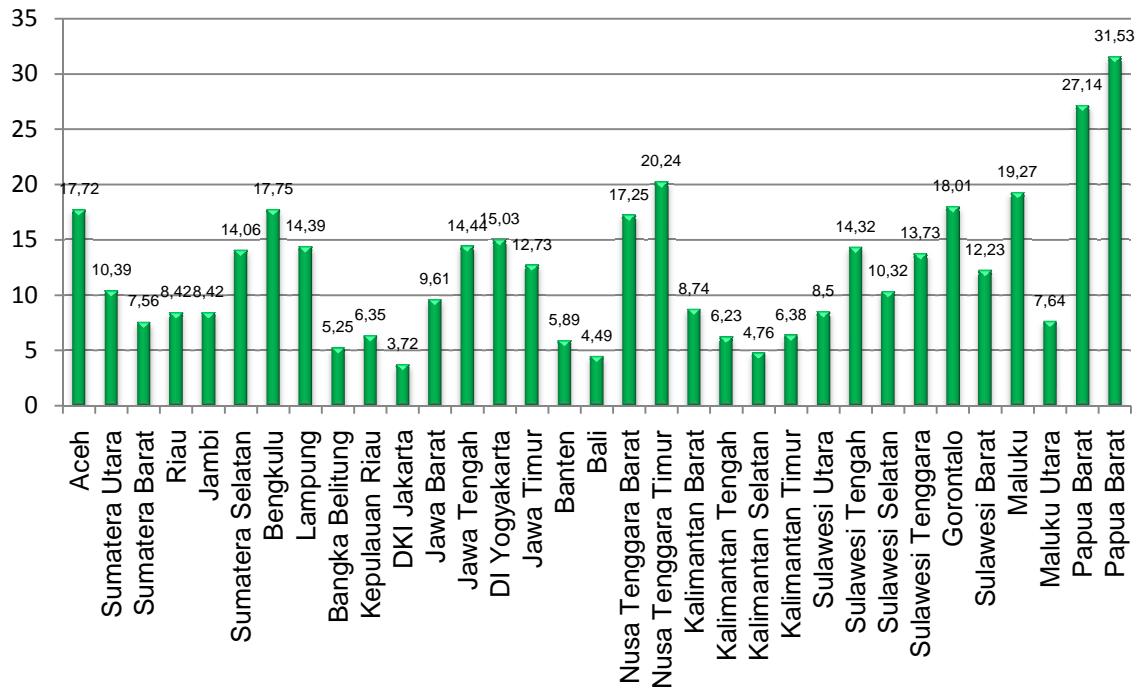
Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi (Bappenas, 2008).

Mengingat kemiskinan merupakan masalah multidimensional maka upaya pengentasan kemiskinan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi daerah, dimana kewenangan sebagian besar didistribusikan ke daerah, sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dituntut lebih besar, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan agar supaya program dan strategi yang dikembangkan tepat sasaran hal ini dikarenakan PEMDA mengetahui betul karakteristik daerahnya. Otonomi daerah memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah dalam mendesain dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya (Muhammad, *et al*, 2005).

Tanggung jawab demikian merupakan konsekwensi dari salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yakni menciptakan sistem layanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.

Kondisi kemiskinan di Indonesia masih cukup memprihantinkan. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang berada jauh di atas angka kemiskinan nasional yaitu 11,47% (untuk tahun 2013).

Gambar 1.1. Grafik Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Di Indonesia, 2013



(Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah)

Dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak kelima setelah provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku dari 33 Provinsi di Indonesia. dan menjadi peringkat pertama jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sulawesi. Besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah 18.01 persen, angka tersebut adalah paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Peringkat Tingkat Kemiskinan Provinsi Di Sulawesi, 2013

Peringkat	Provinsi	Persentase
1	Gorontalo	18,01
2	Sulawesi Tengah	14,32
3	Sulawesi Tenggara	13,73
4	Sulawesi Barat	12,23
5	Sulawesi Selatan	10,32
6	Sulawesi Utara	8,50

(Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah)

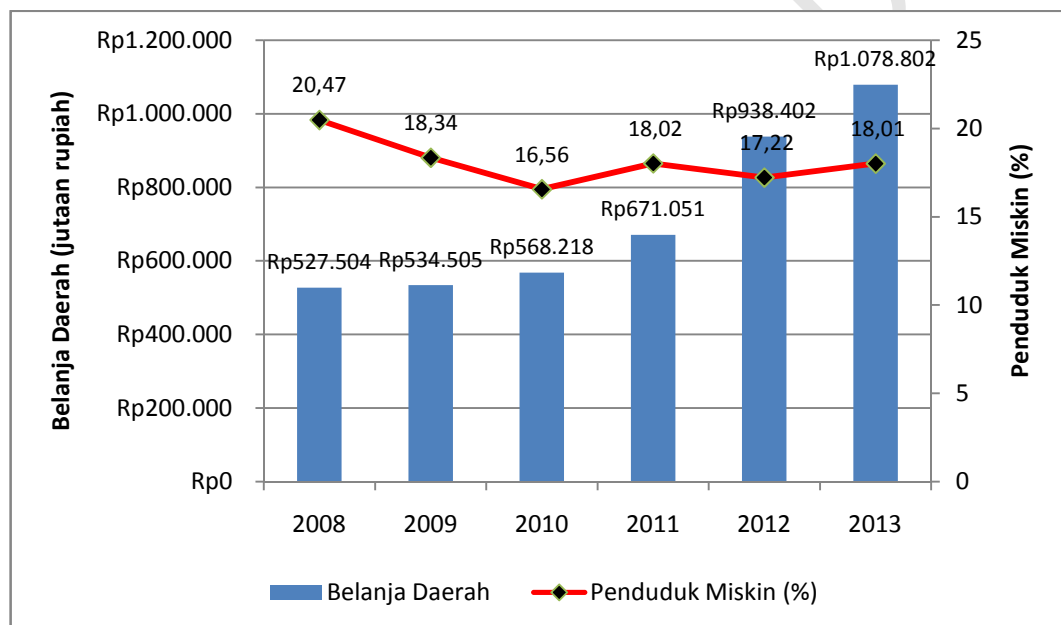
Banyak upaya yang dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi kemiskinan seperti bantuan operasional sekolah, program jaminan kesehatan masyarakat, program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, dan lain-lain.

Sementara itu, anggaran belanja daerah tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 1,078 triliun yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 519,126 miliar dan Belanja Langsung Rp. 559,676 miliar. Angka tersebut meningkat dari Rp. 466,587 miliar untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 471,815 miliar untuk Belanja Langsung pada tahun 2012, dimana tingkat kenaikan untuk Belanja Langsung lebih besar daripada tingkat kenaikan untuk Belanja Tidak Langsung. Anggaran daerah (APBD) tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2001 (Kementerian Keuangan, 2013).

Anggaran yang besar tersebut dibelanjakan oleh daerah untuk membiayai operasional pemerintah dan membiayai urusan-urusan yang

menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perhubungan, pertanian, kehutanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, dan lain-lain. Termasuk dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Gambar 1.2. Grafik Perkembangan Belanja Daerah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo



(Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, diolah)

Dari grafik diatas, terlihat bahwa pengaruh belanja daerah terhadap penurunan penduduk miskin menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, pada tahun 2009 belanja daerah Provinsi Gorontalo meningkat dari Rp.527,504 miliar menjadi Rp.534,505 miliar, dan persentase penduduk miskinnya turun dari 20,47% menjadi 18,34%. Sementara pada tahun 2010 dan 2013 terjadi peningkatan belanja daerah namun tidak dibarengi dengan penurunan persentase kemiskinan, justru terjadi kenaikan terhadap jumlah persentase penduduk miskin yang ada di

Provinsi Gorontalo. Jadi peningkatan jumlah belanja daerah yang dianggarkan tidak selalu menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Pertanyaannya, apakah belanja daerah tersebut telah diprioritaskan pada bidang-bidang yang berpengaruh positif untuk upaya penanggulangan kemiskinan atau tidak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah yang dipergunakan untuk mendanai berbagai urusan diklasifikasikan ke dalam urusan wajib (seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, penataruang, perencanaan pembangunan, tenaga kerja, sosial, dan lain-lain) dan urusan pilihan (seperti pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan lain-lain). Namun, urusan-urusan tersebut memiliki tingkat keterkaitan yang berbeda dengan upaya mengurangi kemiskinan di daerah (Wahyudi, 2011).

Menurut Yao (2007) belanja sektor sosial yang bermanfaat besar atau menguntungkan bagi orang miskin (*pro-poor social expenditures*) mencakup pengeluaran untuk pendidikan dasar, kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, jalan-jalan pedesaan.

Pada RAPBD-P 2013 pemerintah Provinsi Gorontalo fokus pada pencapaian target pembangunan 4 program prioritas, yakni pendidikan gratis, kesehatan gratis, percepatan infrastruktur, dan pengembangan

SDM, dimana 4 program unggulan ini menurut pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mengakomodir semua permasalahan daerah dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat (Biro Humas Protokol Provinsi Gorontalo, 2014).

Namun, di tingkat kabupaten/kota Provinsi Gorontalo, peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan menekan proporsi pemerintahan umum dan infrastruktur. Belanja pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkat dari 20% dari total belanja di tahun 2007 menjadi 30% di tahun 2012, sedangkan kesehatan meningkat dari 6% menjadi 9%. Masing masing urusan mengalami peningkatan belanja riil sebesar 50% dalam kurun waktu 5 tahun. Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan kesehatan diiringi oleh turunnya proporsi belanja pemerintahan umum dari 35% menjadi 26%. Peningkatan proporsi belanja pendidikan dan kesehatan yang diiringi oleh turunnya proporsi belanja pemerintahan umum merupakan hal yang positif karena sumber daya fiskal untuk membiayai pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan menjadi meningkat. Namun di sisi lain, penurunan proporsi belanja infrastruktur dari 27% menjadi 10% harus diwaspadai karena dapat berdampak pada kualitas infrastruktur di Gorontalo (Pemprov Gorontalo dan Universitas Gorontalo, 2014).

1.2 Identifikasi Masalah

Kemiskinan di Provinsi Gorontalo bisa dikatakan masih sangat tinggi. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan meningkatkan anggaran belanja daerah pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan masyarakat miskin. Namun, peningkatan jumlah belanja daerah yang dianggarkan tidak selalu menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Banyak literatur dan studi yang menyatakan bahwa kelompok belanja publik yang memiliki sifat *pro-poor* antara lain belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mengingat pentingnya belanja-belanja publik yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah, untuk itu peneliti tertarik meneliti tentang “Pengaruh Belanja Publik Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh belanja publik di bidang pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
2. Bagaimana pengaruh belanja publik di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

3. Bagaimana pengaruh belanja publik di bidang infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja publik di bidang pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja publik di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja publik di bidang infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang pengaruh belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD terhadap kemiskinan di daerah.

- 2 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.
- 3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk mencari ilmu lebih baik lagi dan meningkatkan wawasan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

Thank you for trying PDF Suite